

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pencegahan Kekerasan Antarpelajar di Indonesia.

Nevina Putri¹, Regina Telaumbanua²

¹Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

²Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Corresponding author's email: ¹nevinaputri03@student.uns.ac.id ²reginatelaumbanua@student.uns.ac.id

Abstract: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bentuk pendidikan yang mengembangkan sikap dan kemampuan warga negara baik dari aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. Menghadapi kondisi saat ini tentu membutuhkan persiapan secara maksimal untuk menyiapkan para generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang profesional. Pemimpin di era global haruslah dapat melakukan perubahan secara terencana, memiliki suatu visi dan misi, memiliki pengaruh yang kuat guna mencapai tujuan bersama hingga mampu memotivasi rekan kerja di Organisasi. Untuk menjalankan roda kepemimpinan seorang pemimpin memerlukan suatu upaya yang strategis, sistematis dan efektif dalam melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai perubahan yang berkemajuan. Melalui pengembangan nilai-nilai kepemimpinan yang terdapat dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat digunakan sebagai acuan bagi generasi muda penerus estafet kepemimpinan untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang handal, berkualitas dan berjiwa nasionalisme.

Kata Kunci: Peran, Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Salah satu misi yang diemban Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan karakter. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik /pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di persekolahan. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata kuliah tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (instructional effect) , bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (nurturant effect). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan.

Dengan kata lain tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam berbagai mata kuliah, Pendidikan Kewarganegaraan harus mengembangkan pendidikan karakter. Lebih- lebih dengan adanya kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi, ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ujung tombak yang tajam bukan tumpul bagi pendidikan karakter.

Dalam makalah ini, focus pembahasannya pada bagaimana mengembangkan karakter dalam materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk sampai pada focus secara sistematis diuraikan lebih dulu mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan program pendidikan yang mempunyai lingkungan interdisipliner yang didasarkan pada teori disiplin ilmu sosial, yaitu inter- disiplin dan multidimensi, dan disiplin ilmu tersebut didasarkan pada disiplin ilmu politik yang terstruktur. Menurut National Council for Social Research (NCSS), kewarganegaraan adalah proses yang mencakup semua pengaruh positif dan bertujuan untuk membentuk pandangan warga tentang peran mereka dalam masyarakat. Sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah membangun warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar, dan standar ukuran (sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945) (Cholisin, 2000: 1.7).

Menurut Malik Fajar dalam Etin Solihatin dan Raharjo (2009: 96) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Etin Sulihatin dan Raharjo (2009: 95) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat multifungsi dengan konteks epistemologis lintas bidang keilmuan.

- 1) Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki otonologi pokok ilmu politik khususnya konsep political democracy untuk aspek duites and right of citizen.
- 2) Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang keilmuan merupakan salah satu dari lima tradisi social studies yakni citizen transmission.
- 3) Secara akademis Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai bidang kajian yang memusatkan telaah pada seluruh dimensi psikologis dan sosiokultural kewarganegaraan individual, dengan menggunakan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi. Intinya yang dipercaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumen dan praktis.

Menurut Abdul Aziz Wahab (2002: 17) berpendapat bahwa hakikat atau intisari dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sama dengan PMP adalah pendidikan nilai dan moral meskipun moral sudah tidak lagi muncul. Sebagai nilai Pendidikan Kewarganegaraan akan membantu siswa dalam kehidupan pribadinya maupun hidup dalam kemasyarakatan.

Setiap warga negara pasti menginginkan status formal dirinya terhadap negaranya. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1949 tentang naturalisasi, yang kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 (Ruminiati 2007: 25).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan watak dan juga karakter manusia khususnya pelajar di Indonesia saat ini supaya dapat membentuk sikap bertanggung jawab dan saling toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pencegahan Kekerasan

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang kita tahu, bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan komposisi masyarakat pluralis. Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk memberi Pendidikan mengenai pluralisme. Pendidikan pluralisme ini lebih menekankan kegiatan untuk tercapainya kedamaian. Menurut pendiri perdamaian, Johan Galtung dalam (Mahnan Marbawi, Setiyo Iswoyo Husni Mubarak, 2020), beliau membahas mengenai konsep damai, bahwa damai menurut beliau adalah ketika kekerasan tidak ada. Maka, selama masih ada kekerasan, menurutnya belum tercipta suatu kedamaian.

Kekerasan dapat dibedakan menjadi 2, antara lain : (1) Kekerasan Langsung (Direct Violence), yaitu segala bentuk kekerasan yang bersifat kasat mata dan mampu melibatkan fisik, harta benda, jiwa, maupun raga seseorang seperti pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. (2) Kekerasan tidak langsung (Indirect

Violence), yaitu kekerasan yang bersifat tidak kasat mata, tidak tampak namun tetap terasa. Perilaku kekerasan ini disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal seperti pengalaman psikologis dan kondisi spiritual maupun dari luar seperti lingkungan. Dari segi aspek pengalaman psikologis, menurut Trisnawati tahun 2014 dengan judul faktor yang mempengaruhi sifat agresif remaja menyatakan bahwa seseorang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan tidak langsung (mencontoh model) seperti apa yang ia baca, dengar dan lihat di media dan juga dari orang lain dan lingkungannya. Berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh, maka perilaku agresif tersebut cenderung bertahan dan terus diulang. Remaja juga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosialnya, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Tidak hanya perilaku agresif saja namun juga perilaku-perilaku lainnya seperti membully, berjudi, melakukan perilaku seks pranikah dan lain-lain. Pengaruh negatif inilah yang akan berdampak pada psikologi remaja apabila terus menerus terpapar dengan perilaku kekerasan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menertibkan masyarakat yang pluralisme dan multikultural. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian konflik maupun kekerasan yang terjadi di lingkup pelajar. Pendidikan menjadi dasar dalam peningkatan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat dan kualitas Pendidikan, akan berpengaruh pada pembangunan bangsa. Namun rendahnya konflik sosial berpengaruh juga pada maraknya konflik dan kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya pelajar karena penanaman nilai moral yang rendah. Maka Pendidikan menjadi objek utama untuk diperbaiki demi mempersiapkan generasi muda yang mampu menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam dasar negara kita, Pancasila.

Simpulan

Kekerasan yang terjadi pada lingkup remaja disebabkan oleh lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, juga media sosial yang digunakan. Kekerasan tentu saja dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah pelajar, bahkan dapat berdampak negative pada pembangunan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan memberi pengajaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Referensi

Jurnal :

Cholisin. 2011. Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 Tahun 2021 | 43 – 54
http://eprints.umpo.ac.id/10672/1/8.%20ARTIKEL%20JURNAL_JPK_UMPO.pdf

Jurnal Basicedu Vol 5 No 5 No 6 Tahun 2021 Halaman 5266-5274
<file:///C:/Users/USER/Downloads/1604-6254-1-PB.pdf>

Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
<file:///C:/Users/USER/Downloads/5167-10283-1-SM.pdf>

Buku :

Jurnal Pendidikan Konvergensi Oktober 2020